



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

## LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU

## PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Papua, Papua Barat dan Maluku Tahun Anggaran 2021 disusun dalam rangka merealisasikan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian target yang dibebankan kepada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku selama tahun 2021. Laporan Kinerja dimaksud wajib dibuat oleh setiap instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja ini selain untuk memenuhi ketentuan dimaksud, berperan juga sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku dalam rangka menuju terwujudnya *good governance*, serta sebagai umpan balik guna lebih meningkatkan kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku dalam waktu mendatang. Di samping itu, berfungsi pula sebagai input bagi Kantor Pusat DJKN dalam rangka melaksanakan penilaian produktivitas kantor-kantor vertikal.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura, Kepala KPKNL Biak, Kepala KPKNL Sorong, dan Kepala KPKNL Ambon atas kerjasamanya dalam pengumpulan data dan penyusunan target 2021 di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Kantor Pusat DJKN maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Kepala Kantor

Nikodemus Sigit Rahardjo

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	1
B. Peran Strategis .....	6
C. Permasalahan.....	7
D. Upaya Pemecahan Masalah.....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
A. Rencana Strategis .....	9
B. Penetapan Kinerja .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>13</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021 .....	13
B. Realisasi Anggaran .....	17
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>18</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku merupakan Unit Instansi Vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang terdiri dari 1 jabatan struktural eselon II (Kepala Kantor), 6 jabatan eselon III, dan 15 jabatan eselon IV yang terdiri dari:

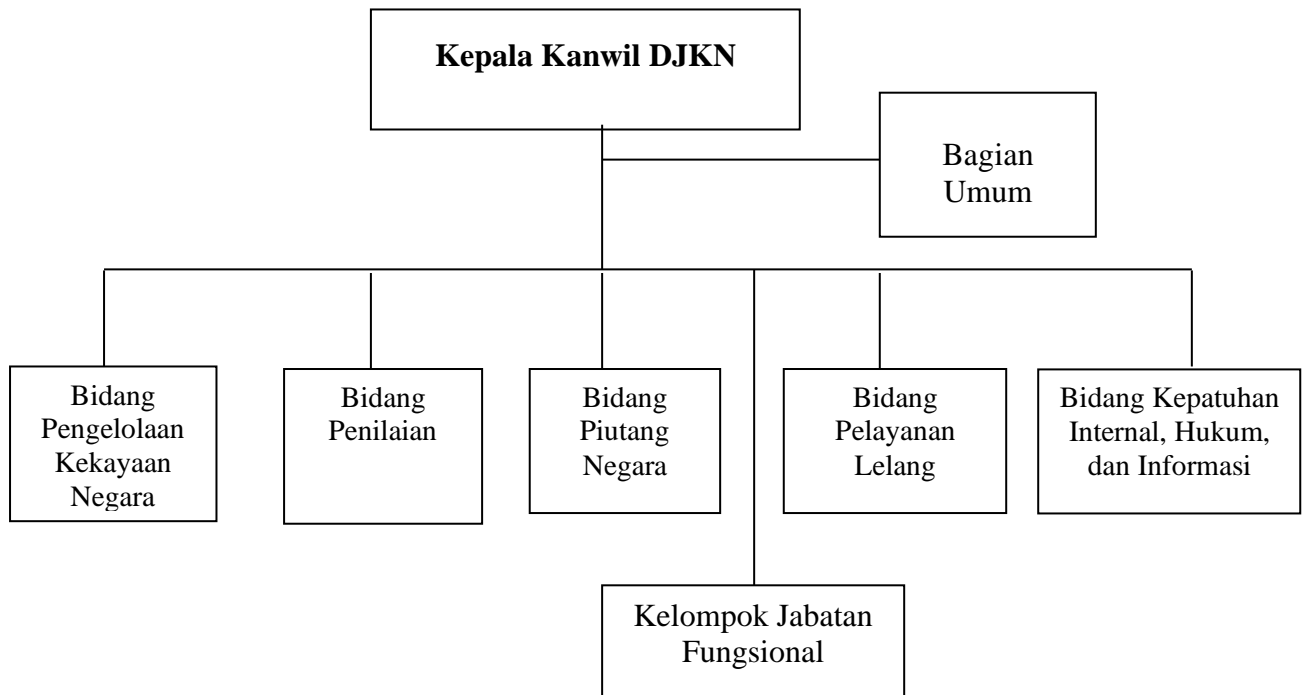
1. Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah.
2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang kekayaan negara, serta pengoordinasian penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan Kantor Wilayah.
3. Bidang Penilaian, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian.
4. Bidang Piutang Negara, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang negara, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, permintaan keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, serta penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang, bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan, pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin

hutang, penyiapan pengolahan data, monitoring pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang Negara.

5. Bidang Pelayanan Lelang, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalan potensi dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang.
6. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
  - b. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*), serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan tahunan;
  - c. melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyajian informasi, dan hubungan kemasyarakatan.

Bagan Organisasi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku saat ini dapat dilihat pada Bagan I:

**Bagan I**  
**Bagan Organisasi**  
**Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku**



Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang, dengan wilayah kerja meliputi 3 (satu) Provinsi sebagai berikut :

1. Provinsi Papua;
2. Provinsi Papua Barat;
3. Provinsi Maluku.

Dalam melaksanakan tugas, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan Negara;
2. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;

3. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang Negara;
4. pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang Negara;
5. pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
6. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
7. pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang;
10. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
11. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
12. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

## B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Jumlah pegawai di lingkungan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku serta kantor operasional di bawahnya per tanggal 30 Desember 2021 berjumlah 128 pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan :

No.	Golongan	Ruang				Total
		A	B	C	D	
1.	II	7	0	20	7	34
2.	III	41	11	16	12	80
3.	IV	4	5	0	0	9
	<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>123</b>

## 2. Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Golongan Ruang				Total
		I	II	III	IV	
1.	SLTA	0	2	4	0	6
2.	D1	0	9	2	0	11
3.	D3	0	23	1	0	24
4.	D4/S1	0	0	61	0	61
5.	S2	0	0	12	9	21
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>80</b>	<b>9</b>	<b>123</b>

## 3. Tenaga Fungsional Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku

No.	Unit Kerja	Jurusita	Pelelang	Pemeriksa	Penilai	Total
1.	Kanwil	5	2	7	7	21
2.	KPKNL Ambon	2	4	3	5	14
3.	KPKNL Sorong	1	4	3	5	13
4.	KPKNL Jayapura	3	1	-	4	8
5.	KPKNL Biak	1	3	-	6	10
	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>66</b>

**C. SARANA DAN PRASARANA**

Dalam kegiatan operasionalnya Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku telah menempati Gedung Keuangan Negara Jayapura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 08 Gurabesi Kota Jayapura Jayapura Utara. Sebelumnya beralamat di Jalan Raya Abepura Komplek Papua Trade Center (PTC), Kelapa Dua Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Disamping itu, guna kelancaran tugas Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku juga ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Kendaraan operasional sebanyak 6 unit minibus dan 2 unit sepeda motor dalam kondisi baik;
2. Komputer (PC) sebanyak 18 unit, Laptop 28 unit dalam kondisi baik;
3. Ruang kerja yang ber-AC;
4. Sarana penunjang lainnya berupa peralatan dan mesin;

5. Serta Rumah Dinas 10 (sepuluh) unit dengan 6 unit dalam kondisi baik dan 4 unit dalam kondisi rusak ringan.

#### **D. PERAN STRATEGIS**

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi DJKN di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang dan pelayanan Lelang, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran Strategis Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara adalah mengoptimalkan pengelolaan Kekayaan Negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Kekayaan Negara yang difokuskan pada utilisasi Kekayaan Negara, pengamanan Kekayaan Negara, pembinaan dan penata usahaan Kekayaan Negara pada wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Selain itu Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku juga memiliki tugas melaksanakan penilaian aset (BMN) yang berperan strategis untuk menyediakan informasi nilai wajar sekaligus analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU).

2. Memberikan Pembinaan pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku di bidang Pengurusan Piutang Negara adalah penyelamatan keuangan Negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan melalui proses penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan unit lain sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Memberikan pelayanan lelang

Lelang berperan besar dalam menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku senantiasa mengupayakan penggalan lelang secara terus-menerus baik lelang eksekusi maupun lelang Non-eksekusi sehingga lelang oleh KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku senantiasa menjadi salah satu sarana jual beli yang diminati masyarakat dan juga menjadi salah satu *tools* untuk ikut serta dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional.

4. Memberikan kontribusi pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang Negara, DJKN memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, DJKN memperoleh hasil bea lelang termasuk biad lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP.

## **E. PERMASALAHAN**

### 1. Permasalahan Internal:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) Fungsional yang kurang memadai dari segi kuantitas untuk sebuah Kanwil DJKN yang mempunyai wilayah yang cukup luas (Papua, Papua Barat, dan Maluku) dengan *stakeholder* yang cukup banyak.
- b. Anggaran yang kurang memadai guna menunjang mobilitas maksimal/optimal dari jajaran Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Hal ini karena luas dan sulitnya medan kerja yang menjadi wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.
- c. Sarana dan prasarana penunjang kinerja yang dirasa masih kurang, seperti rumah dinas, kendaraan operasional, PC, Laptop dll.

### 2. Permasalahan Eksternal:

- a. Kondisi alam yang berat dan luasnya wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku yang sebagian besar hanya bisa ditempuh dengan alat transportasi laut atau udara.
- b. Rendahnya kualitas SDM dari *stakeholder* yang menjadi mitra kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.
- c. Tingkat keamanan yang kurang kondusif di wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.
- d. Adanya aturan atau regulasi lokal yang kurang mendukung tercapainya target kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.
- e. Mewabahnya pandemi *Covid-19* yang membatasi ruang gerak dari para pegawai Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku terlebih di KPKNL lingkup Kanwil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

## **F. UPAYA PEMECAHAN MASALAH**

1. Pemecahan Permasalahan Internal
  - a. Telah diajukannya permohonan penambahan pegawai Fungsional ke kantor pusat DJKN serta mengirimkan pegawai Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku ke berbagai diklat dan sosialisasi/workshop. Selain itu untuk meningkatkan kualitas SDM Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku juga sering mengadakan sendiri sosialisasi dengan mendatangkan narasumber dari luar maupun narasumber dari internal.
  - b. Mengajukan permohonan penambahan pagu Anggaran pada saat penyusunan RKAKL atau melakukan penghematan anggaran.
  - c. Mengajukan permohonan penambahan Pagu Anggaran khususnya untuk jenis belanja modal dan belanja barang.
2. Pemecahan Permasalahan Eksternal
  - a. Mengajukan permohonan penambahan anggaran biaya perjalanan dinas, mengadakan acara/kegiatan kedinasan yang dipusatkan di satu tempat dan memanggil/mengumpulkan *stakeholder* di satu tempat.
  - b. Mengadakan sosialisasi atau pelatihan untuk *stakeholder* serta membuka layanan konsultasi yang berkaitan dengan tupoksi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.
  - c. Lebih selektif dalam mengadakan kegiatan/acara atau perjalanan dinas, dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk tugas-tugas yang mengandung resiko kerawanan tinggi.
  - d. Meningkatkan kemampuan para pegawai DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku khususnya yang pendatang (bukan Orang Asli Papua) untuk memahami/menyelami berbagai macam kearifan lokal yang ada di wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku.
  - e. Tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, mengoptimalkan sarana digital dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : KEP-245/KN/2021 tanggal 29 Agustus 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2021-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan **visi DJKN**, yaitu **”Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”**. Pengertian **profesional** dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. **akuntabel** artinya pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. **Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat** merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

## 1. Misi

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu :

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif, sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

## 2. Tujuan

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- d. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

## 3. Sasaran

- a. Mempercepat penyelesaian kasus piutang Negara dan pencapaian target IKU;
- b. Tercapainya mekanisme pengelolaan barang jaminan yang efektif, efisien dan terpercaya;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan lelang;
- d. Meningkatkan pengelolaan data dan meminimalisasi perkara hukum;
- e. Melakukan inventarisasi kekayaan negara secara menyeluruh, untuk meningkatkan manfaat dari kekayaan negara serta utilisasi kekayaan negara secara umum;

- f. Melaksanakan penilaian kekayaan negara sehingga diketahui nilai riil kekayaan negara;
- g. Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi Kanwil DJKN.

#### **4. Kebijakan dan Program Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku**

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui kebijaksanaan dan program.

a. kebijakan:

kebijakan Pengurusan Piutang, Lelang, Kekayaan Negara dan Penilaian Kekayaan Negara telah ditetapkan meliputi:

- 1) Peningkatan Pembinaan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara;
- 2) Peningkatan pengawasan dan pembinaan kualitas Pelayanan Lelang;
- 3) Peningkatan kualitas, pengawasan, dan pembinaan dalam Pengelolaan Kekayaan Negara;
- 4) Peningkatan pengawasan dan pembinaan kualitas dalam Pelayanan Penilaian;
- 5) Peningkatan kualitas penyajian informasi dan pengoptimalisasi penanganan perkara;
- 6) Melaksanakan cara kerja New Normal dalam melaksanakan tugas (rapat daring, WFO, WFH, dan WFHB).

b. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijaksanaan yang dijalankan oleh Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku diuraikan dalam program sebagai berikut :

- 1) Percepatan pelayanan pengurusan Piutang Negara;
- 2) Percepatan pelayanan lelang;
- 3) Mengoptimalkan sistem administrasi data Pengelolaan Kekayaan negara, Piutang, dan Lelang;
- 4) Mengoptimalkan upaya penyelesaian Perkara;

- 5) Pelayanan di Bidang Umum yang meliputi ; Kepegawaian, Keuangan, dan TURT;
- 6) Tertib administrasi BMN;
- 7) Optimalisasi utilisasi kekayaan negara;
- 8) Penilaian BMN.

**B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021**

Penetapan Kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku tahun 2021 sesuai dengan Peta Strategis Kemenkeu Two terdiri dari 10 Sasaran Strategis (SS) dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2021 adalah berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU
1	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62	100
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100
		Persentase penurunan nilai outstanding Piutang Negara	100	100
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Indeks Ketepatan waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	89	100
		Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	100
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4.4	100
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi	100	100
		Persentase implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	100
		Deviasi Ketergantungan hasil Penilaian	22	100
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase efektifitas penyelesaian BKPN	100	100
		Persentase Produktifitas Lelang	35	100
		Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92	100
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12.5	100
6	Edukasi yang Efektif	Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi	89	100
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase Tindak lanjut persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85	100
8	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100	100
9	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	75	100
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5	100

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 2021

TAHUN 2021

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							28.61%	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							114.44%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	69.82%	19%	40%	112.609%	112.61%	hijau
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	138.99%	14%	30%	138.99%	120.00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan nilai outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	111.38%	14%	30%	111.38%	111.38%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16.70%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							115.23%	
2a-N	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	P/H	89.00	97.16	11%	44%	109.16%	109.16%	hijau
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	174.48%	14%	56%	174.48%	120.00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							107.50%	
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	E/M	4.40	4.73	21%	100%	107.50%	107.50%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							34.02%	
4	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							111.45%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	100.19%	19%	43%	100.19%	100.19%	hijau
4b-N	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	126.74%	11%	25%	126.74%	120.00%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	1.36%	14%	32%	193.82%	120.00%	hijau
5	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114.88%	
5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	P/M	100%	110.81%	14%	25%	110.81%	110.81%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35%	48.91%	14%	25%	139.73%	120.00%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventic	P/M	92%	100.00%	14%	25%	108.70%	108.70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	P/M	12.5%	0.21%	14%	25%	198.32%	120.00%	hijau
6	Edukasi yang efektif							111.24%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	89.00	99.00	14%	100%	111.24%	111.24%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							115.98%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaankekayaan negara	P/M	85%	98.58%	14%	100%	115.98%	115.98%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							34.18%	
8	SDM yang Kompeten							120.00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120.00%	14%	100%	120.00%	120.00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							120.00%	
9a-N	Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja	P/M	75	93.65	14%	100%	124.87%	120.00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							101.81%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95.5%	97.23%	14%	100%	101.81%	101.81%	hijau
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>								<b>113.51%</b>	<b>hijau</b>

Dari hasil pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu Two Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku tahun 2021 sebagaimana diatas, maka untuk evaluasi dan analisis kinerja dapat dirinci sebagai berikut :

### **SS 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara Yang optimal**

1. Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK 69.82%
2. Persentase realisasi penerimaan negara dan pengelolaan kekayaan negara dan lelang 138.99%
3. Persentase Penurunan nilai outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d. 2017)

Realisasi penerimaan negara dan pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2021 sebesar Rp 38.531,467,509 atau sebesar 138.99% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 27.723.305.121,- .

### **SS 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**

4. Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang 97.16
5. Persentase Realisasi Pokok Lelang 174.48

Realisasi Persentase Realisasi Pokok Lelang sebesar 174.48% atau sebesar Rp 704.880.871.523 dari Target sebesar 404.000.000.000 tersebut dapat tercapai karena Pelaksanaan penggalian potensi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan kelebihan lelang.

### **SS 3 : Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien**

6. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL

Realisasi indeks kepuasan pelanggan pada tahun 2021 sebesar 4.73 dari target yang telah ditetapkan sebesar 4,4. Hasil ini diperoleh berdasarkan hasil survei internal yang telah dilakukan dan penyebaran kuesioner terhadap *stake holder*, dimana hasilnya menunjukkan tren positif dengan meningkatnya tingkat kepuasan *stake holder* terhadap pelayanan yang dilakukan kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.

#### **SS 4: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif**

7. Persentase Bidang Tanah BMN yang disertipikatkan 100.19
8. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) 126.74
9. Deviasi ketergantungan hasil penilaian 1.36

Tahun 2021 IKU dari Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif semuanya mencapai target bahkan melampaui target, hal ini disebabkan

Realisasi :

- a. Pemahaman yang baik oleh satker tentang pentingnya pengelolaan BMN secara tertib khususnya terhadap BMN berupa tanah;
- b. Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku serta KPKNL dengan Satker-satker dalam hal kerjasama pengelolaan BMN secara tertib;
- c. Segala permasalahan dapat dimitigasi dengan baik oleh Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Realisasi IKU Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang adalah sebesar 94,65, melampaui target yang sebesar 86. IKU ini dapat dicapai karena komunikasi dan Kerjasama yang baik antara *Stake Holder* pada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.

#### **SS 5: Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif**

10. Persentase efektifitas penyelesaian BKPN
11. Persentase produktifitas Lelang
12. Persentase pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional
13. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Tahun 2021 IKU dari Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif semuanya mencapai target bahkan melampaui target, hal ini disebabkan

Realisasi :

- a. Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku serta KPKNL dengan Satker-satker dalam hal Lelang dan Piutang Negara;
- b. Segala permasalahan dapat dimitigasi dengan baik oleh Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.

#### **SS 6: Edukasi yang Efektif**

---

##### 14. Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi

---

Untuk tahun 2021 tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi melampaui target dengan realisasi sebesar 99 dari target yang ditetapkan sebesar 89. Hal ini disebabkan karena komunikasi yang baik antara Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dengan KPKNL di bawahnya.

#### **SS 7: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif**

---

##### 15. Persentase tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN

---

Pada tahun 2021 tingkat Persentase tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN melampaui target dengan realisasi sebesar 98.58% dari target yang ditetapkan sebesar 85%.

#### **SS 8 : SDM yang Kompeten**

---

##### 16. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

---

Persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2021 terealisasi 120% dari target 100%. Hal ini menunjukkan perhatian yang tinggi dari Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku terhadap kebutuhan pegawai yang mempunyai kemampuan dan keahlian tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaannya, dibuktikan dengan banyaknya dan seringnya pegawai ditugaskan untuk mengikuti berbagai diklat dan sosialisasi.

---

## SS 9: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

### 17. Nilai hasil review pengelolaan kinerja

Realisasi dari Nilai hasil *review* pengelolaan kinerja mencapai 93.65 dari target sebesar 75, hal ini terjadi karena pengelolaan kinerja pada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku berbasis BSC.

## SS 10: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

### 18. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran di tahun 2021 tercapai 97,23% dari target 95.5%. Keberhasilan ini merupakan hasil dari perencanaan anggaran di awal tahun yang tepat serta didukung oleh konsistensi pelaksanaan realisasi belanja modal dan belanja barang tepat sasaran yang merupakan buah dari sinergi yang terjalin baik antara bagian umum dan bidang teknis.

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku di tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.207.124.569,00 atau 95,63% dari Pagu yang disediakan sebesar Rp 2,307,929,000.00. Pada tahun 2022 Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku mendapat alokasi pagu DIPA sebesar Rp 1,981,135,000.00 yang terdiri dari belanja barang Rp 1.981.135.000,00 belanja modal Rp 0.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Kinerja Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku selama tahun 2021 cukup baik, hal ini bisa dilihat dari capaian IKU yang diraih selama tahun 2021. Dari 18 IKU yang dimiliki Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Semua IKU dapat tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan (hijau). Prestasi yang di capai Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku di tahun 2021 ini, tidak terlepas dari makin dihayati dan dilaksanakannya nilai-nilai Kementerian Keuangan oleh seluruh jajaran Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku termasuk jajaran KPKNL dibawahnya.

Adanya masalah/kendala dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diuraikan pada BAB I, bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak berbuat yang terbaik bagi organisasi, dengan bekerja lebih giat lagi serta terus menerus mengamalkan nilai-nilai dari Kementerian Keuangan. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan prestasi/capaian kinerja yang sudah baik, bahkan terus berusaha untuk meningkatkannya.